

PENGUKURAN RENCANA AKSI KECAMATAN KAHU TAHUN 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ PROSES	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 202				CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2022				FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANGGUN G JAWAB	KETERANG AN
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	PENDUKUN G	PENGHAMBAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kahu	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Realisasi penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	persentase	100	12,652,017,805.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	2,550,650,276	5,981,174,170	9,318,431,005	12,754,675,783	51	109	174	101		Belum optimalnya Realisasi Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Perlu adanya Peningkatan Kinerja dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah	Sekcam	
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	47,213,230.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15,793,780	22,335,100	33,626,180	46,558,230	-	-	-	-		Belum Optimalnya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perlu adanya Ketetapan Waktu dalam Hal Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	3	27,682,780.00	25%	25%	25%	25%	1	1	1		13,622,780	17,572,780	23,262,780	27,572,780	60.87	7.83	11.74	19.56		Untuk Perencanaan kadang terlambat oleh terlambatnya Ketersediaan Satuan standar harga (SSH)	Ketersediaan Satuan standar Harga Sebelum Menyusun Perencanaan Perangkat Daerah		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat daerah	Dokumen	1	3,900,320.00	25%	25%	25%	25%				1	-	840,320	2,370,320	3,900,320	25.55	0.00	6.20	51.40		Seringnya mengubah RKA karena adanya sub Kegiatan yang di geser akibat adanya Dana Penanganan Covid 19	Ketersediaan Satuan Standar Harga Sebelum Menyusun Perencanaan Perangkat Daerah		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat daerah	Dokumen	1	1,670,000.00	25%	25%	25%	25%				1	-	-	420,000	1,670,000	0.00	0.00	18.92	58.17		Keterlambatan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dikarenakan waktu yang kurang Efisien	Memanfaatkan Waktu Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tepat waktu	Kasubag Program dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat daerah	Dokumen	1	5,863,050.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	340,000	871,000	871,000	5,863,050	0.00	0.00	0.00	67.65		Keterlambatan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dikarenakan waktu yang kurang Efisien	Memanfaatkan Waktu Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tepat waktu		
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah diokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat daerah	Dokumen	1	2,801,080.00	25%	25%	25%	25%			1		-	-	1,951,080	2,801,080	58.77	0.00	0.00	41.23					
			Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisrar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat	Dokumen	1	1,571,000.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	721,000	1,061,000	1,571,000	1,571,000	0.00	22.38	0.00	77.62		Kurangnya Dokumen penunjang dalam hal penyelesaian Laporan evnalsi Kinerja Pegawai	diperlukan dokumen pendukung untuk menjadi bahan penyelesaian Laporan		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	1	3,725,000.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	1,110,000	1,990,000	3,180,000	3,180,000								Kasubag Program dan Keuangan	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12,216,597,055.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	2,472,649,556	5,807,033,080	9,004,601,625	12,342,668,683	18.83	25.92	26.80	22.49		Terjadinya perubahan pagu anggaran yang signifikan	Perlu diadakan kesatuan pagu anggaran mengikuti anggaran perubahan daerah.	Kasi Pelayanan Umum Kasubag Umum dan	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan bagi	Bulan	12	12,208,197,055.00	25%	25%	25%	25%	3	3	3	3	2,471,249,556	5,803,533,080	8,998,301,625	12,334,268,683	18.83	25.92	26.80	22.49		Sering terjadinya kelebihan Pagu anggaran	Perlu diadakan kesatuan pagu anggaran supaya tidak terjadi pengambilan		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	8,400,000.00	25%	25%	25%	25%	3	3	3	3	1,400,000	3,500,000	6,300,000	8,400,000									
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Bulan	0	8,400,000.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	1,400,000	3,500,000	6,300,000	8,400,000	8.16	19.55	15.37	18.01		Belum optimalnya Pelaksanaan Administrasi umum perangkat daerah	Perlu adanya ke-engkapan pengadministrasian umum yang memadai		
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan bagi	Bulan	12	8,400,000.00	25%	25%	25%	25%	3	2	3	4	1,400,000	3,500,000	6,300,000	8,400,000	23.72	27.61	19.55	38.37		Terkadang kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik	Diperlukan peralatan dan perlengkapan yang memadai sesuai dengan kebutuhan kantor		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase	265	138,605,060.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20,156,260	51,720,730	94,522,150	124,962,640	0.00	0.00	0.00	0.00		Kurangnya bahan makanan di SSH aset pada aplikasi	perlu pengempurnaan Ser-tandar harga yang signifikan pada aplikasi		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket penyediaan alat Tulis kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran	Paket	1	26,541,540.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	6,494,680	14,916,900	21,765,240	26,534,470	0.00	0.00	0.00	0.00		Penggunaan dokumen tersebar di beberapa sub kegiatan	penggunaan dokumen seluruhnya terpusat pada satu sub kegiatan		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan makanan dan minuman harian bagi pegawai dan tamu sesuai rencana	Paket	1	70,482,020.00	25%	25%	25%	25%			1		6,570,080	15,624,330	39,401,260	61,721,020	8.33	33.33	12.50	45.83		Kurangnya minat baca terhadap bacaan perundang - undangan	Perlu diadakan minat baca pada pegawai asin		
			Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggadaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan pengadaan penunjang	Paket	1	8,129,500.00	25%	25%	25%	25%		1			1,361,500	4,909,500	7,325,650	8,127,150	8.72	36.79	44.78	5.83		Pemberian SPDP tidak menyeluruh di tiap Kepala seksi	perlu diadakan pembagian spdp pada semua kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian		

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket penyediaan bahan cetakana dan peraturan perundang-undangan	Kali	12	2,640,000.00	25%	25%	25%	25%	3	3	3	3	540,000	1,200,000	1,980,000	2,640,000	0.00	0.00	89.90	0.00		Pengadaan Barang Belun sepenuhnya terpenuhi	Perlu diadakan pengusulan Barang yang sesuai dengan kebutuhan	Kasi Pelayanan Umum	
			Penyelenggaraan Rpaat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti oleh aparat perangkat daerah	Kegiatan	250	30,812,000.00	25%	25%	25%	25%	62	62	63	63	5,190,000	15,070,000	24,050,000	25,940,000	0.00	0.00	100.00	0.00		Jumlah Pengadaan Mebel setiap Tahunnya Masih Terbatas sehingga Mempengaruhi Standar Pelayanan	Perlu adanya Pengadaan mebel yang memiliki standar Pengadaan yang dapat meningkatkan kinerja	Kasi Pelayanan Umum	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	0	41,635,000.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	-	-	30,135,000	41,635,000	0.00	0.00	79.80	0.00					
			Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubeleur kantor sesuai rencana kebutuhan	Paket	2	19,440,000.00	25%	25%	25%	25%			1	1	-	-	19,440,000	19,440,000	6.32	35.91	11.04	46.55		Kurang maksimalnya Pengelolaan penyediaan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Perlu adanya kesesuaian dalam pengelolaan penyediaan sarana penunjang pemerintahan		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kanto sesuai rencana kebutuhan	Paket	3	22,195,000.00	25%	25%	25%	25%			1	2	-	-	10,695,000	22,195,000	9.58	28.02	17.41	44.63		Pemakaian Link Yang Tidak Menentu di setiap bulan, Akhirnya Mempengaruhi Jumlah	Kesesuaian Antara Jumlah Pemakaian Daya dengan Pelayanan Kncerja yang ada setiap		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentas e	0	121,567,460.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	27,365,211	56,129,773	85,721,506	114,951,210	3.06	43.79	4.68	48.47		Adanya Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Tenaga Honoror yang Pembayaran tidak Sesuai di Setiap Bulanan	Perlu adanya Ketetapan Standar Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Honoror yang Sesuai dan Dalam		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket pembayaran jasa komunikasi jasa komunikasi bulanan	rekening	24	18,630,260.00	0%	0%	100%	0%	6	6	6	6	4,130,911	8,661,173	13,018,606	18,014,010	12.01	22.34	28.41	26.59		Kurang maksimalnya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Perlu diupayakan sebaik mungkin terhadap pemeliharaan Barang Milik Daerah		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah realisasi pembayaran jasa/upah kerja bulanan bagi tenaga administrasi/tenaga	Kali	12	102,937,200.00	25%	25%	25%	25%	3	3	3	3	23,234,300	47,468,600	72,702,900	96,937,200	12.55	22.97	28.91	17.00		Pemeliharaan Kendaraan yang terbatas dengan standar harga yang sudah di setukan	perlu dilakukan koordinasi dengan aset terkait dengan biaya pemeliharaan kendaraan		
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang Dilaksanakn sesuai Standar Pelayanan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	0	78,000,000.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	13,285,469	40,455,487	63,524,544	75,500,020	20.92	19.77	47.56	11.75					
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah paket pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Kegiatan	5	73,900,000.00	25%	25%	25%	25%	1	1	1	2	11,985,469	38,655,487	61,034,544	71,400,020	2.55	24.28	8.75	51.02		kurangan pekerja yang lebih dalam pemeliharaan Gedung Kantor	diperlukan pekerja yang lebih dalam rangka pemeliharaan gedung kantor secara berkala		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai rencana kebutuhan	Paket	4	4,100,000.00	25%	25%	25%	25%	1	1	1	1	1,300,000	1,800,000	2,490,000	4,100,000	27.80	10.04	5.89	2.28		Belum optimalnya penyelenggaraan Pemertintahan Daerah	Diperlukan kerjasama antar Tim dalam proses Penyelenggaraan Pemertintahan Da lam hal Pelayanan Public		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Cakupan Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentas e	14	165,000,200.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	7,984,080	24,028,380	37,849,200	159,174,200	27.80	10.04	5.89	2.28		Kurangnya Koordinasi antar Opd Tehnis	perlu diadakan rapat Tim dalam pelayanan opd OPD yang datang ke rumah warga		
			koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen	12	15,000,200.00	25%	25%	25%	25%	3	3	3	3	784,080	4,159,380	10,780,200	15,000,200	27.80	10.04	5.89	2.28		Pada saat pelaksanaan Monevung terkadang OPD pulang sebelum kegiatan berakhir	perlu diadakan rapat Tim dalam pelayanan opd OPD yang datang ke rumah warga		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Dokumen	12	15,000,200.00	25%	25%	25%	25%	3	3	3	3	784,080	4,159,380	10,780,200	15,000,200	0.00	0.00	0.00	100.00		Belum terpendanya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tepat waktu	Diperlukan adanya kerja sama antar Tim dalam hal penyelesaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana	persentas e	2	150,000,000.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	7,200,000	19,869,000	27,069,000	144,174,000	0.00	0.00	0.00	100.00		Belum optimalnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Diperlukan stakeholder dan pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan		
			Pembagunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kegiatan	1	104,299,080.00	25%	25%	25%	25%				1	-	-	-	104,299,080	0.00	0.00	0.00	100.00		Masih Kurangnya Koordinasi antar Desa sehingga Laporan Pokja Desa sering Terlambat yang	Perlu adanya Koordinasi dan Sinergitas antar Pokja Desa dan FKKS dalam Hal Penyusunan		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan	1	45,700,920.00	25%	25%	25%	25%				1	7,200,000	19,869,000	27,069,000	39,874,920	0.00	40.24	0.00	14.83		Kurangnya kegiatan dalam Posko PPKM Mikro	diperlukan adanya kerjasama antar tim Posko PPKM Mikro		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	persentas e	12	27,000,000.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	4,500,000	11,250,000	20,250,000	27,000,000	14.71	14.71	22.06	48.53		Kordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum belum optimal	Diperlukan optimalisasi terhadap stakeholder dan pihak terkait dalam hal kordinasi ketentraman		
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah koordinasi upaya ketentraman dan ketertiban	Kegiatan	12	27,000,000.00	25%	25%	25%	25%	3	3	3	3	4,500,000	11,250,000	20,250,000	27,000,000	14.71	14.71	22.06	48.53		Belum optimalnya kordinasi penyelenggaraan ketentraman da ketertiban	meningkatkan Kordinasi dengan stakeholder terkait		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan	Kegiatan	12	27,000,000.00	25%	25%	25%	25%	3	3	3	3	4,500,000	11,250,000	20,250,000	27,000,000	14.71	14.71	22.06	48.53		Kordinasi Lintas Sektor masih perlu ditingkatkan dalam rangka pengawasan yang lebih Komprehensif	Perlu Didadakan Rapat Kordinasi Lintas Sektor Secara Rutin dan Berkala		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintah	persentas e	38	42,217,050.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	6,575,000	19,809,250	27,282,050	30,894,050	13.04	38.78	24.27	30.74		Belum sepenuhnya terpenuhi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	diperlukan Stakeholder dalam hal pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kasi Pem, Kasi PPMd Kasi Trantib	
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa	Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan	Laporan	38	42,217,050.00	25%	25%	25%	25%	9	9	10	10	6,575,000	19,809,250	27,282,050	30,894,050	13.04	38.78	24.27	30.74		Belum Optimalnya Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasidan Koordinasi Pembinaan	Diperlukan partisipasi aktif bagi Kepala Desa dalam hal Pembinaan dan		

			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes	Laporan	19	19,897,050.00	25%	25%	25%	25%	19				1,600,000	7,334,250	11,099,050	13,283,050	20.25	29.18	24.30	26.27				
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa	Desa	19	22,320,000.00	25%	25%	25%	25%			19		4,975,000	12,475,000	16,183,000	17,611,000	5.83	48.38	24.23	35.21				



A. MUCHLIS, S. STP., M.H.
NIP. 19790727 199810 1 002

